

Bandar Lampung, 31 Januari 2025

No. : 024/LLB-BDL/DIR.UM/I/2025

Kepada Yth,
DPP Perbarindo dan Media BPR
RUMAH PERBARINDO,
Komp. PATRA II No.46
Jl. Jend. Ahmad Yani-Bypass
Cempaka Putih- Jakpus

Perihal: Penyampaian Laporan Transparansi Penerapan Tata Kelola
Tahun 2024 PT. BPR Langgenglestari Bersama

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 12/SEOJK.03/2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat

Bersama ini kami Sampaikan Laporan Transparansi Penerapan Tata Kelola Tahun 2024 PT. BPR Langgenglestari Bersama (*terlampir*).

Demikian agar maklum dan Kami Mengucapkan Terimakasih.

PT. BPR LANGGENGLESTARI BERSAMA

Direksi,

JUNAIDI
Direktur

Bandar Lampung, 31 Januari 2025

No. : 008/LLB-BDL/DIR.OJK/I/2025

Kepada Yth,

Kepala Kantor OTORITAS JASA KEUANGAN
Provinsi Lampung
Jl. Way Sekampung No. 9
Di –
Bandar Lampung

Perihal: Penyampaian Laporan Transparansi Penerapan Tata Kelola
Tahun 2024 PT. BPR Langgenglestari Bersama

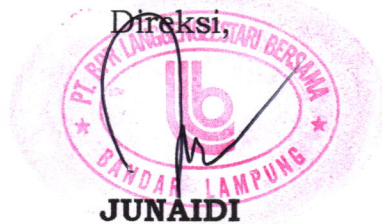
Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 12/SEOJK.03/2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat

Bersama ini kami Sampaikan hasil Scan Laporan Transparansi Penerapan Tata Kelola Tahun 2024 PT. BPR Langgenglestari Bersama (terlampir).

Demikian agar maklum dan Kami Mengucapkan Terimakasih.

PT. BPR LANGGENGLESTARI BERSAMA

Direksi,



JUNAIDI

Direktur

Tulis

Kotak Masuk 544

Berbintang

Ditunda

Terkirim

Draf

Selengkapnya

Label

544



1 dari 437



Laporan Transparansi Penerapan Tata Kelola Tahun 2024



bank langgeng <banklanggeng@gmail.com>

kepada Mailing

Kepada Yth,

Bapak/Ibu Pen

Di-

Tempat

dari: **bank langgeng** <banklanggeng@gmail.com>

kepada: Mailing Room KOLP <mailingroomKOLP@ojk.go.id>

tanggal: 3 Feb 2025, 09.33

subjek: Laporan Transparansi Penerapan Tata Kelola Tahun 2024

dikirim oleh: gmail.com

09.33 (0 menit yang lalu)



Sesuai dengan

Bank Perekon

Bank Perekonomian Rakyat.

Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat Dan
Nomor 12/SEOJK.03/2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi

Bersama ini kami Sampaikan hasil Scan Laporan Transparansi Penerapan Tata Kelola Tahun 2024 PT. BPR Langgenglestari Bersama *(terlampir)*.

Terima Kasih,

PT. BPR LanggengLestari Bersama

Jalan Laks. Malahayati Nomor 7-7A Telukbetung Kota Bandar Lampung

Telp. 0721-487878

Fax. 0721-487118

**LAPORAN TRANSPARANSI
PENERAPAN TATA KELOLA (GCG)
PT. BPR LANGGENGLESTARI BERSAMA
TAHUN 2024**



**JL. LAKS MALAHAYATI NO. 7-7A
TELEPON: 0721 487878**

PENJELASAN UMUM

Dalam upaya menciptakan kegiatan perbankan yg sehat & berkualitas BPR Langgeng selalu berupaya menerapkan GCG, baik dari segi Kecukupan SDM agar tidak terjadi rangkap jabatan yang berpotensi terjadinya benturan kepentingan, peningkatan kualitas SDM dengan pelatihan dari internal atau eksternal dan pembinaan dari Direksi dan Pengawasan Dewan Komisaris atau pimpinan unit kerja masing masing. Kinerja BPR dapat terlihat pada laporan keuangan kualitatif & kuantitatif. Kinerja kualitatif telah dilakukan perbaikan antara lain pembuatan SK Direksi dan melakukan pengkinian Kebijakan dan Prosedur dengan menyesuaikan dengan regulasi terbaru. Kinerja kuantitatif pada Neraca & L/ R ada perbaikan bila dibandingkan dengan kinerja laporan keuangan 2023. Beberapa rasio keuangan secara keseluruhan sesuai dengan ketentuan dan target tercapai, sedangkan yg memerlukan perbaikan pada tahun berikutnya adalah rasio NPL dan/ atau CKPN.

BPR memiliki komitmen yg kuat untuk melaksanakan GCG yg telah diatur oleh OJK, agar BPR dapat terus tumbuh secara berkelanjutan dan memiliki daya saing di industri perbankan. Penerapan GCG yang baik pada BPR didukung oleh integritas yg tinggi melalui proses intern yg melibatkan seluruh organ BPR dari Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan agar penerapan GCG menjadi budaya perusahaan dalam setiap kegiatan usaha.

BPR Langgeng telah beroperasi lebih dari 27 tahun dan senantiasa menerapkan prinsip- prinsip Tata Kelola dalam setiap kegiatan usahanya. Prinsip Tata Kelola yang dimaksud adalah Keterbukaan, Akuntabilitas, Tanggung Jawab, Independensi dan Kewajaran. Hal ini didorong oleh komitmen BPR untuk mencapai Visi, yaitu menjadi penyedia layanan perbankan yang terpercaya dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dengan dukungan SDM yang kompeten untuk menciptakan nilai tambah bagi para nasabah. Dalam penerapan Tata Kelola, BPR selalu mengacu pada 3 (tiga) aspek Tata Kelola yaitu Struktur, Proses dan Hasil Tata Kelola.

Pada tahun 2024 BPR Langgenglestari Bersama masih terdapat kekurangan penunjang tata kelola yaitu masih belum terpenuhinya strukur Direksi yaitu Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan, dan rencana pemenuhan akan dilakukan pada tahun 2025 sesuai dengan action plan rencana tindak merger yang akan dilakukan.

LAPORAN TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA BPR

A. Ringkasan Hasil Penilaian (*Self Assessment*) Atas Penerapan Tata Kelola

Nama BPR	PT. BPR LANGGENGLESTARI BERSAMA
Alamat	JL. LAKS MALAHAYATI NO. 7-7A
Nomor Telepon	0721 487878
Posisi Laporan	31 Desember 2024
Peringkat Komposit	3
Predikat Komposit	Cukup Baik
Kesimpulan / Penjelasan	Manajemen BPR telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum cukup baik. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan, dan yang perlu memerlukan perhatian manajemen BPR yaitu Pemenuhan struktur Direksi dikarenakan terdapat kekosongan Direksi Yang Membawahi Fungsi Kepatuhan serta memperbaiki proses tata kelola dari aspek kepatuhan dikarenakan masih ditemukan Denda dan Sanksi yang dikenakan oleh OJK.

B. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi		
1.	Nama	:	JUNAIDI
	Jabatan	:	Direktur
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	a. Bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan Bank secara profesional dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian Bank, berpedoman pada Anggaran Dasar Perusahaan serta ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku b. Merealisasikan pencapaian target Kinerja Keuangan Bank sebagaimana yang ditetapkan dalam Rencana Bisnis Bank c. Melaksanakan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) dengan memperhatikan aspek kecukupan SDM dan kompetensinya. d. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Audit Intern BPR, Auditor Ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau Otoritas Lainnya. e. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan Perundang-undangan. f. Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis dibidang kepegawaian kepada pegawai. g. Melakukan Evaluasi terkait Kebijakan yang mempengaruhi kegiatan bisnis agar Kebijakan tersebut sesuai dengan kondisi terkini BPR		

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris :	
a. Penerapan Tata Kelola telah dilaksanakan secara konsisten dan menerapkan Manajemen Risiko yang efektif dalam setiap kegiatan operasional dan bisnis BPR Langgeng. b. Tingkat Kesehatan Bank dipertahankan dalam posisi sehat. c. Direksi telah melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia sesuai rekomendasi Dewan Komisaris yaitu : Melakukan evaluasi kinerja (minimal bersifat bulanan) terhadap seluruh pegawai, memberikan coaching, mentoring dan pembinaan agar lebih disiplin dalam menerapkan Peraturan Perusahaan. Pemberian sanksi telah dilaksanakan kepada pegawai yang melanggar ketentuan/peraturan yang berlaku. Apresiasi juga telah diserahkan bagi pegawai yang memberikan kontribusi positif bagi BPR. d. Monitor secara ketat debitur yang mengalami penurunan kualitas Kredit. e. Temuan pemeriksaan OJK telah tuntas ditindaklanjuti sebelum bulan Desember 2024. f. Semua temuan Audit Internal telah ditindaklanjuti dan telah diberikan sosialisasi kepada seluruh pegawai terkait pelaksanaan internal control dalam melaksanakan tugas masing- masing. g. Memastikan tindaklanjut Penerapan Manajemen risiko terkait penetapan limit telah sesuai dengan kondisi bisnis BPR	
Penjelasan Lebih Lanjut :	
Pengurus BPR Langgenglestari Bersama yaitu Dewan Komisaris dan Direksi selalu mengkomunikasi secara rutin dalam kegiatan operasional agar sejalan dengan tata kelola yang sehat sesuai dengan ketentuan regulasi OJK. Selanjutnya pengurus secara dua arah membahas perkembangan kegiatan operasional BPR baik secara lisan maupun dalam bentuk rapat, seperti strategi dan rencana tindak BPR dalam memperbaiki tingkat kesehatan, menetapkan skala prioritas yang harus ditindaklanjuti, kendala yang dihadapi BPR. Pada semester 2 tahun 2024 pengurus dan manajemen lebih banyak membahas penyelesaian kredit bermasalah, Cadangan Kerugian Penurunan Nilai [CKPN] dan rencana Merger dengan BPR-BPR dengan PSP yang sama pada tahun 2025	

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris		
1.	Nama	:	HARDY YUNNARAGA
	Jabatan	:	Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	a. Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi b. Memastikan penerapan Tata Kelola dalam seluruh kegiatan usaha dan operasional bank c. Memberikan saran atau advis kepada Direksi berkaitan dengan isu- isu strategis dan proses pekerjaan d. Memastikan Direksi telah menindaklanjuti seluruh temuan audit dan rekomendasi dari Audit Intern, Audit Ekstern dan hasil pemeriksaan pengawas Otoritas Jasa Keuangan dan Instansi lainnya. e. Mengkoordinir pembagian tugas Dewan Komisaris. f. Memastikan Penerapan Manajemen Risiko telah sesuai dengan kebijakan yang telah direalisasikan		
2.	Nama	:	KASWADI
	Jabatan	:	Komisaris
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	a. Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi b. Memastikan penerapan Tata Kelola dalam seluruh kegiatan usaha dan operasional bank		

- c. Memberikan saran atau advis kepada kepada Direksi berkaitan dengan isu- isu strategis dan proses pekerjaan
- d. Memastikan Direksi telah menindaklanjuti seluruh temuan audit dan rekomendasi dari Audit Intern, Audit Ekstern dan hasil pemeriksaan pengawas Otoritas Jasa Keuangan dan Instansi lainnya.
- e. Memastikan Penerapan Manajemen Risiko telah sesuai dengan kebijakan yang telah direalisasikan

Rekomendasi Kepada Direksi :

- a. Melaksanakan penerapan Tata Kelola secara konsisten dan penerapan Manajemen Risiko yang efektif dalam setiap kegiatan operasional dan bisnis.
- b. Mempertahankan Tingkat Kesehatan Bank selalu dalam posisi Sehat.
- c. Secara rutin melakukan pengelolaan sumber daya manusia yaitu : Evaluasi kinerja (minimal periode bulanan) terhadap seluruh pegawai, Memberikan coaching, mentoring dan pembinaan serta lebih disiplin dalam menerapkan Peraturan Perusahaan, Mampu bertindak tegas dalam pemberian sanksi bagi pegawai yang melanggar ketentuan/ peraturan yang berlaku dan memberikan reward / apresiasi kepada pegawai yang memberikan kontribusi positif bagi BPR.
- d. Memonitor secara ketat debitur yang mengalami penurunan kualitas kredit agar dapat mendeteksi secara dini setiap potensi kegagalan bayar dan dapat mengantisipasi secara cepat.
- e. Semua komitmen perbaikan atas temuan pemeriksaan OJK agar segera ditindaklanjuti dan sudah tuntas pada paling lambat bulan Desember 2024.
- f. Menindaklanjuti semua temuan Audit Internal dan segera mengambil langkah- langkah perbaikan control agar tidak terjadi kembali temuan berulang apalagi yang bersifat signifikan.
- g. Melakukan inovasi untuk memanfaatkan teknologi informasi untuk proses kerja maupun akuisisi bisnis.

Penjelasan Lebih Lanjut :

- 1. Menjalankan keputusan RUPS tahunan dan RUPS LB
- 2. Merealisasikan RBB 2024 dengan sumber daya yang dimiliki oleh BPR Langgengestari Bersama.
- 3. Melakukan tindakan untuk memperbaiki tingkat kesehatan BPR
- 4. Menyelesaikan Aktiva Produktif bermasalah menjadi produktif

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada)
a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

No.	Tugas dan Tanggung Jawab Komite
1.	Komite Audit
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
2.	Komite Pemantau Risiko
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Tugas dan Tanggung Jawab :

Tidak ada
Tindak Lanjut Rekomendasi Tugas dan Tanggung Jawab Komite
Berdasarkan jumlah modal inti bpr langgeng belum diwajibkan memiliki / membentuk komite dalam penyusunan struktur organisasi, dengan pertimbangan tersebut dan efisiensi biaya maka bpr langgeng belum membentuk komite.

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

No.	Nama	Keahlian	Jabatan di Komite	Pihak Independen
1.				
2.				
3.				
Tindak Lanjut Rekomendasi Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite		:	BPR langgeng dalam struktur organisasinya tidak mempunyai anggota komite independen.	

c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

No.	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite		
1.	Komite Audit		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
2.	Komite Pemantau Risiko		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
Penjelasan Lebih Lanjut			
Karena Tidak Mempunyai Komite Maka Bpr Langgeng Tidak Ada Program Kerja Untuk Komite			

B. Kepemilikan Saham Direksi

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	JUNAIDI	Rp0	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Pada Periode Kerja Tahun 2024, Direksi Tidak Memiliki Saham Pada Bpr Langgenglestari Bersama			

2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No.	Nama Direksi	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	JUNAIDI	-	-	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Pada Tahun 2024, Direksi Tidak Memiliki Saham Di Perusahaan Lain				

C. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/ atau Pemegang Saham

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	JUNAIDI	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Direksi Tidak Memiliki Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham, Antar Direksi, Ataupun Dengan Dewan Komisaris				

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	JUNAIDI	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Sampai Saat Ini Direksi Tidak Mempunyai Hubungan Keluarga Terhadap Sesama Direksi, Dewan Komisaris Dan Pemegang Saham				

D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	HARDY YUNNARAGA	Rp10.749.000.000	48.86%
2.	KASWADI	Rp0	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Pada Periode tahun 2024, Tn. HARDY YUNNARAGA menjabat sebagai Komisaris Utama serta menjadi Pemegang Saham Pengendali pada BPR LanggengLestari Bersama			

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No.	Nama Dewan Komisaris	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	HARDY YUNNARAGA	601270	PT. BPR Artharindo	21.72%
2.	HARDY YUNNARAGA	600042	PT. BPR Supradana Mas	75.35%
3.	HARDY YUNNARAGA	601955	PT. BPR Prabumegah Kencana	43.58%
4.	HARDY YUNNARAGA	602716	PT BPR Perdana Cipta Sejahtera	22.5%
5.	HARDY YUNNARAGA	600186	PT. BPR Artha Margahayu	14%
6.	HARDY YUNNARAGA	-	PT. BPRS Artha Aceh Sejahtera	34.52%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Kepemilikan saham Tn Hardy Yunaraga pada tahun 2024 yang merupakan salah satu Anggota Dewan Komisaris dan PSP pada BPR Langgenglestari Bersama.				

E. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/ atau Pemegang Saham BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	HARDY YUNNARAGA	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	KASWADI	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
DALAM KEDUDUKANNYA SEBAGAI PENGURUS DI PT. BPR LANGGENGLESTARI				

BERSAMA TIDAK MEMILIKI HUBUNGAN KEUANGAN TERHADAP SESAMA DEWAN KOMISARIS DAN ATAU KEPADA DIREKSI.

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	HARDY YUNNARAGA	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	KASWADI	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
DEWAN KOMISARIS TIDAK MEMILIKI HUBUNGAN KELUARGA DAN ATAU TERHADAP DIREKSI				

F. Paket/ Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

1. Paket/ Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1.	Gaji	1	Rp462.369.240	2	Rp428.568.000
2.	Tunjangan	1	Rp30.000.000	0	Rp0
3.	Tantiem	0	Rp0	0	Rp0
4.	Kompensasi Berbasis Saham	0	Rp0	0	Rp0
5.	Remunerasi Lainnya	0	Rp0	0	Rp0
Total			Rp492.369.240		Rp428.568.000
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Pada tahun 2024 pengurus (Dewan Komisaris hanya mendapat paket remunerasi & bonus, kemudian Direksi mendapat remunerasi dan tunjangan jabatan dan bonus)					

2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1.	Perumahan	Tunjangan Rumah Dinas (1)	Tidak ada
2.	Transportasi	Kendaraan Operasional (1)	Kendaraan Operasional (1)
3.	Asuransi Kesehatan	BPJS Kesehatan (1)	BPJS Kesehatan (1)
4.	Fasilitas Lainnya	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :			

1. Salah Satu Anggota Direksi [Direktur] mendapat fasilitas Kendaraan Operasional berupa Toyota Kijang Inova Tahun 2013
2. Direksi mendapat fasilitas BPJS kesehatan dan BPJS Tenaga kerja
3. Salah Satu Anggota Dewan Komisaris [Komisaris Utama] mendapat fasilitas Kendaraan Operasional berupa Kijang Inova Venturer Tahun 2018
4. Salah Satu Anggota Direksi [Direktur] mendapat fasilitas Rumah Dinas [rumah tersebut didapat berdasarkan sewa]
5. 1 (satu) anggota Komisaris mendapat fasilitas BPJS Kesehatan dan BPJS TK

G. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Keterangan	Perbandingan
	(a/b) : 1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	5.37 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1 : 1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1.33 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	2.01 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	2.74 : 1
Penjelasan Lebih Lanjut :	
Data diambil berdasarkan gaji bulan Desember 2024	

H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

1. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1.	25 Januari 2024	2	Membahas Evaluasi Kinerja Keuangan dan Non Keuangan BPR semester II Tahun 2023
2.	23 Februari 2024	2	Membahas temuan atas kelemahan/pelanggaran atas ketentuan/kebijakan sebagaimana diatur dalam Standar Operasional dan Prosedur Internal BPR, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Peraturan Perundang-undangan lainnya, dalam kegiatan operasional BPR periode Tahun 2023

3.	02 Mei 2024	6	1. Mendelegasikan tugas-tugas rutin dan berkala Direktur Operasional dan Merangkap Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko kepada beberapa Pajabat Eksekutif (PE Kepatuhan dan Manajemen Risiko dan Kabag. Operasional) 2. Melimpahkan kewenangan dan tanggungjawab Direktur Operasional dan Merangkap Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan dan Manajemen Risiko ke Direktur Utama
4.	20 Juni 2024	8	1. Pembagian Tugas terhadap penanggungjawab NPL, Hapus Buku dan AYDA 2. Evaluasi atas kunjungan debiitur
5.	28 Juni 2025	3	1. Rencana Penggabungan BPR dengan PSP sama dalam satu wilayah Kepulauan Utama [Sumatera] an Bpk. Hardy Yunnaraga 2. Perubahan Strutur Organisasi dan Optimalisasi SDM 3. Rencana Pemenuhan kekosongan Anggota Direksi
6.	04 Juli 2024	6	1. Penanganan Debitur Khusus AYDA 2. Penanganan Debitur Khusus Hapus Buku
7.	16 Juli 2024	5	Pembahasan dengan Pemegang Saham PSP [Komisaris Utama] dan Pengacara terkait dengan Penyelesaian Debitur Bermasalah
8.	18 Juli 2024	6	Pembahasan Lanjutan terkait Action Plan Penggabungan BPR Langgenglestari Bersama dengan BPR Prabumegah Kencana dan BPR Artha Margahayu
9.	25 Juli 2024	5	1. Pembahasan Metode Perhitungan CKPN 2. Pembahasan Sistem dengan Berkoordinasi dengan Vendor masalah CKPN 3. Pembahasan Kendala dalam Perhitungan CKPN
10.	10 Oktober 2024	9	a. Tindak lanjut Penggabungan BPR dengan PSP yang sama dalam satu wilayah kepulauan utama (Sumatera) atas nama Hardy Yunnaraga dan Ibu Lindawati; b. Rancangan Perubahan struktur organisasi KP dan KC dan optimalisasi SDM; c. Pembahasan Rencana Bisnis Masing-masing BPR. d. Melakukan Pencadangan Imbalan Kerja untuk BPR yang melakukan Penggabungan (PT. BPR Prabumegah Kencana dan PT. BPR Artha Margahayu) e. Pembentukan TIM Rencana Merger
11.	25 November 2024	13	1. Pembahasan Migrasi CBS ARB 2. Pembahasan Struktur Data Core Banking ARB dan Pengelolaan User di Sistem ARB
12.	06 Desember 2024	2	1. Penunjukan AP dan KAP untuk pemeriksaan Laporan Keuangan untuk Periode data tahun 2024 2. Mengusulkan Rencana Penunjukan AP dan KAP pada RUPSLB
Penjelasan Lebih Lanjut Pelaksanaan Rapat dalam 1 tahun :			

Dewan Komisaris, Direksi, Pejabat Eksekutif dan Pegawai telah melakukan rapat-rapat pada tahun 2024 untuk menyelesaikan prioritas pekerjaan sesuai dengan RBB 2024, serta melakukan evaluasi dan penyampaian kondisi kinerja perusahaan apa yang sudah tercapai maupun yang masih belum tercapai.

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No.	Nama Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1.	HARDY YUNNARAGA	7	0	58.33%
2.	KASWADI	12	0	100%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Dewan Komisaris Sebagian Hadir pada saat rapat dilaksanakan [khusus pembahasan rapat dengan PE dan Karyawan]				

I. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

Jumlah Penyimpangan Internal*) (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelum nya	Tahun Laporan	Tahun Sebelum nya	Tahun Laporan	Tahun Sebelum nya	Tahun Laporan	Tahun Sebelum nya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0
Penjelasan Lebih Lanjut :								
1. Dewan Komisaris & Direksi memberikan sosialisasi kepada seluruh karyawan untuk tidak melakukan fraud dalam perusahaan. 2. Direksi dan Dewan Komisaris tidak melakukan fraud pada periode sbmlm tahun laporan maupun pada periode tahun laporan 2024. 3. Pegawai tetap dan Tidak Tetap tidak melakukan fraud pada periode sbmlm tahun laporan maupun pada periode tahun laporan 2024.								

J. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai	2	0
Dalam Proses Penyelesaian	3	0
Total	5	0
Penjelasan Lebih Lanjut		
1. Debitur an Muhammad Ali Hamid, Pokok Gugatan: Perbuatan melawan hukum, melalui kuasa hukum debitur Law Firm Yuntoro SH dan Rekan atas lelang No. 850/20/2022 yang berada di dusun Haringin, merak belatung kec. kalianda dengan limit lelang sebesar Rp. 1.506.100.000,- bahwa penggugat menyatakan tidak setuju atas nilai limit lelang dan meminta pembatalan lelang. [gugatan telah selesai pada semester 1 tahun 2024] 2. Debitur an Sulaiman Yunus, Pokok Gugatan: Gugatan sederhana karena cidera janji [wanprestasi] menghukum dan memerintahkan tergugat untuk melunasi fasilitas kreditnya [gugatan telah selesai pada semester 1 tahun 2024] 3. Debitur an Christine, Pokok Gugatan: Permohonan Eksekusi [BPR Langgeng yang melakukan gugatan kepada debitur] masih PROSES 4. Debitur an Yakub Lawalata, Pokok Gugatan: Penggugat keberatan atan peralihan hak tagih dan peralihan aset jaminan dilakukan tanpa sepengetahuan dan persetujuan tertulis dari penggugat. [masih PROSES] 5. Debitur an Aminata Wijaya, Pokok Gugatan: Penggugat menggugat tergugat 1 mengembalikan uang sewa yang sudah diterima sebesar Rp. 150Jt, dan Menggugat tergugat 2 untuk menunda proses eksekusi jaminan [Masih PROSES]		

K. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

No.	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Pengambil Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
1.							
2.							
3.							
Penjelasan Lebih Lanjut :							
Selama periode tahun 2023 seluruh manajemen BPR Langgeng yaitu Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan, serta masih sesuai dengan ketentuan.							

L. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

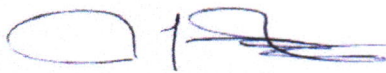
No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1.					

Penjelasan Lebih Lanjut Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

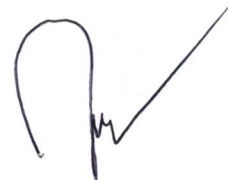
Pada tahun 2024 manajemen tidak melakukan kegiatan politik, sedangkan untuk kegiatan sosial terdapat kegiatan santunan sosial seperti sumbangan untuk kegiatan keagamaan, sumbangan kepada panti asuhan, dan sumbangan kegiatan sosial di lingkungan sekitar kantor, namun seluruh sumbangan tersebut sifatnya insidental dan tidak mengikat.

Bandar Lampung, 31 Januari 2024

PT. BPR LANGGENGLESTARI BERSAMA



HARDY YUNNARAGA
Komisaris Utama



JUNAIDI
Direktur

KESIMPULAN UMUM
HASIL PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA
TAHUN 2024

Nama BPR : PT. BPR LANGGENGLESTARI BERSAMA

Alamat : JL. LAKS MALAHAYATI NO. 7-7A

Nomor Telepon : 0721 487878

Posisi Laporan : Tahun 2024

Modal Inti : Rp32.931.772.046

Total Aset : Rp307.990.370.464

No	Kriteria / Indikator	Nilai Faktor
1	Aspek Pemegang Saham	Nilai 2 (Memadai)
2	Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi	Nilai 2 (Memadai)
3	Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris	Nilai 2 (Memadai)
4	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	Tidak Dinilai
5	Penanganan Benturan Kepentingan	Nilai 2 (Memadai)
6	Penerapan Fungsi Kepatuhan	Nilai 3 (Cukup Memadai)
7	Penerapan Fungsi Audit Intern	Nilai 3 (Cukup Memadai)
8	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	Nilai 3 (Cukup Memadai)
9	Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud	Nilai 2 (Memadai)
10	Batas Maksimum Pemberian Kredit	Nilai 2 (Memadai)
11	Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi	Nilai 2 (Memadai)
12	Rencana Bisnis BPR	Nilai 2 (Memadai)
Peringkat Komposit		3
Predikat Komposit		Cukup Baik



Kesimpulan

Manajemen BPR telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum cukup baik. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut tidak cukup signifikan, dan yang perlu memerlukan perhatian manajemen BPR yaitu Pemenuhan struktur Direksi dikarenakan terapat kekosongan Direksi Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan serta memperbaiki proses tata kelola dari aspek kepatuhan dikarenakan masih ditemukan Denda dan Saksi yang dikenakan oleh OJK.

Faktor Positif

A. Faktor Positif Struktur dan Infrastruktur

1. Ditinjau dari sisi regulasi, struktur dan infrastruktur Aspek Pemegang Saham yang dimiliki BPR dinilai terpenuhi secara keseluruhan.
2. Hasil evaluasi menunjukkan struktur dan infrastruktur Penanganan Benturan Kepentingan pada BPR berada dalam kondisi terpenuhi secara keseluruhan.
3. Berdasarkan hasil penilaian, struktur dan infrastruktur Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud pada BPR dinilai terpenuhi secara keseluruhan.
4. Hasil penilaian menunjukkan bahwa struktur dan infrastruktur Batas Maksimum Pemberian Kredit BPR terpenuhi secara keseluruhan.
5. Implementasi struktur dan infrastruktur Rencana Bisnis BPR di BPR menunjukkan kondisi terpenuhi secara keseluruhan meski ada beberapa faktor yang perlu ditingkatkan.

B. Faktor Positif Proses Penerapan Tata Kelola

1. BPR memiliki proses penerapan tata kelola Aspek Pemegang Saham proses penerapan tata kelola Aspek Pemegang Saham yang dinilai memadai.
2. Berdasarkan hasil penilaian, proses penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi pada BPR dinilai memadai.
3. Proses penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris pada BPR saat ini dinilai memadai.
4. Hasil penilaian menunjukkan bahwa proses penerapan tata kelola Penanganan Benturan Kepentingan BPR tergolong memadai.
5. Ditinjau dari sisi regulasi, proses penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Kepatuhan yang dimiliki BPR dinilai cukup memadai.
6. Proses penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Audit Intern pada BPR proses penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Audit Intern dinilai memadai.
7. Ditinjau dari sisi regulasi, proses penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Audit Ekstern yang dimiliki BPR dinilai memadai.
8. Implementasi proses penerapan tata kelola Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud di BPR menunjukkan kondisi memadai.
9. Hasil evaluasi menunjukkan proses penerapan tata kelola Batas Maksimum Pemberian Kredit pada BPR berada dalam kondisi memadai.
10. Proses penerapan tata kelola Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi pada BPR saat ini dinilai memadai.
11. BPR telah mengimplementasikan proses penerapan tata kelola pada Rencana Bisnis BPR dengan penilaian memadai.

C. Faktor Positif Hasil Penerapan Tata Kelola

1. Hasil penilaian menunjukkan bahwa hasil penerapan tata kelola Aspek Pemegang Saham BPR tergolong memadai.
2. Penilaian terhadap hasil penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan

Wewenang Direksi yang dimiliki BPR adalah memadai.

3. Penilaian terhadap hasil penerapan tata kelola Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris yang dimiliki BPR adalah memadai.
4. Hasil evaluasi menunjukkan hasil penerapan tata kelola Penanganan Benturan Kepentingan pada BPR berada dalam kondisi memadai.
5. Hasil penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Kepatuhan pada BPR saat ini dinilai cukup memadai.
6. Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki hasil penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Audit Intern dengan pencapaian cukup memadai.
7. Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki hasil penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Audit Ekstern dengan pencapaian memadai.
8. Hasil penerapan tata kelola Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud pada BPR saat ini dinilai memadai.
9. Berdasarkan hasil penilaian, hasil penerapan tata kelola Batas Maksimum Pemberian Kredit pada BPR dinilai memadai.
10. Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki hasil penerapan tata kelola Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi dengan pencapaian memadai.
11. Hasil penerapan tata kelola Rencana Bisnis BPR pada BPR hasil penerapan tata kelola Rencana Bisnis BPR dinilai memadai.

Faktor Negatif

A. Faktor Negatif Struktur dan Infrastruktur

1. Berdasarkan hasil penilaian, BPR memperlihatkan struktur dan infrastruktur Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi dengan penilaian masih terpenuhi sebagian.
2. Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki struktur dan infrastruktur Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris dengan pencapaian masih terpenuhi sebagian.
3. Hasil evaluasi menunjukkan struktur dan infrastruktur Penerapan Fungsi Kepatuhan pada BPR berada dalam kondisi masih terpenuhi sebagian.
4. Struktur dan infrastruktur Penerapan Fungsi Audit Intern pada BPR struktur dan infrastruktur Penerapan Fungsi Audit Intern dinilai masih terpenuhi sebagian.
5. Hasil evaluasi menunjukkan struktur dan infrastruktur Penerapan Fungsi Audit Ekstern pada BPR berada dalam kondisi masih terpenuhi sebagian.
6. Berdasarkan hasil penilaian, struktur dan infrastruktur Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi pada BPR dinilai masih terpenuhi sebagian.

B. Faktor Negatif Proses Penerapan Tata Kelola

1. Hasil evaluasi menunjukkan proses penerapan tata kelola Penerapan Fungsi Kepatuhan, yaitu Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan, pada BPR berada dalam kondisi masih kurang memadai dikarenakan belum terpenuhinya Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan

C. Faktor Negatif Hasil Penerapan Tata Kelola

Tidak terdapat Faktor Negatif atau Nihil



Bandar Lampung, 24 Januari 2025

PT. BPR LANGGENGLESTARI BERSAMA


HARDY YUNNARAGA
Komisaris Utama




JUNAIDI
Direktur